

Lembaga bank dan non-bank sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha mikro kecil (UMK) di Sulawesi Selatan

Madris^{1✉}, Sabir², Juliansyah Roy³

^{1,2}Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara karakteristik UMK (Usaha Mikro Kecil) dengan perilaku pengambilan kredit melalui lembaga pembiayaan bank dan bukan bank di Sulawesi Selatan. Populasi penelitian adalah pengusaha mikro dan kecil yang mengambil kredit melalui lembaga perbankan maupun bukan perbankan (non-bank). Pertimbangan dipilihnya unit UMK sebagai populasi penelitian adalah mengingat UMK perlu mendapat perhatian khusus oleh perbankan dalam rangka memperlancar proses pembiayaan. Sampel dipilih dengan metode accidental sampling dengan total responden sebanyak 360 unit usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Peranan lembaga pembiayaan bank masih sangat dominan dibanding dengan lembaga pembiayaan non-bank dalam hal penyaluran kredit pada UMK di Sulawesi Selatan, baik pada skala usaha mikro maupun pada skala usaha kecil. (2) tidak ada perbedaan yang signifikan pemberian kredit menurut jenis usaha (hortikultura/tanaman pangan, perikanan/kelautan dan industri rumah tangga) baik lembaga pembiayaan bank maupun non-bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga jenis usaha tersebut di sisi lembaga pembiayaan memiliki prospek usaha yang relatif sama.

Kata kunci: Alternatif; sumber pembiayaan; usaha mikro kecil

Bank and non-bank institutions as alternative sources of financing for micro small enterprises (MSEs) in South Sulawesi

Abstract

This study aims to determine the relationship between the characteristics of MSEs (Micro Small Enterprises) with the behavior of taking credit through bank and non-bank financing institutions in South Sulawesi. The study population is micro and small entrepreneurs who take credit through banking and non-banking institutions (non-banks). The consideration of choosing MSE units as the research population is considering that MSEs need special attention by banks in order to expedite the financing process. The sample was selected by accidental sampling method with a total of 360 business units. The results showed that: (1) The role of bank financing institutions is still very dominant compared to non-bank financing institutions in terms of lending to MSEs in South Sulawesi, both on a micro business scale and on a small business scale. (2) There is no significant difference in lending according to the type of business (horticulture/food crops, fisheries/marine and home industry) both bank and non-bank financing institutions. This shows that the three types of businesses on the financing institution side have relatively similar business prospects.

Keywords: Alternatives; sources of financing; small micro enterprises

PENDAHULUAN

Sesungguhnya, usaha mikro-kecil (UMK) berhubungan dengan kehidupan rakyat kecil sehari-hari karena menyangkut jutaan orang yang bekerja pada sektor ini. Siapapun diharapkan selalu dapat mengambil peran. UMK selalu hadir karena memang diperlukan, tanpa perlu adanya rekayasa politis. Usaha pada UMK dapat membuktikan ketangguhannya, terutama pada masa krisis maupun ketika Indonesia dilanda badai krisis ekonomi pada tahun 1997. Keunggulan UMK dapat dibanding dengan skala usaha menengah dan besar antara lain, UKM memiliki fleksibilitas kebutuhan investasi yang secara umum relatif kecil, berbasis bahan baku lokal, menyerap banyak tenaga kerja, terutama yang tidak tersalur pada sektor pemerintahan dan industri yang membutuhkan kualifikasi standar pendidikan dan keterampilan tertentu. Namun, dukungan pembiayaan terhadap pengembangan UMK masih sangat kurang memadai.

Seiring dengan semakin membaiknya kinerja perekonomian ke depan, persepsi permasalahan atas kebutuhan dana/modal juga akan cenderung bergeser dan akan lebih terfokus pada perhatian tentang adanya kesenjangan yang relatif besar antara jumlah dana masyarakat yang dihimpun lembaga pembiayaan bank dan non-bank dibandingkan dengan jumlah penyaluran dana lembaga pembiayaan bank dan non-bank daerah dalam bentuk kredit kepada usaha mikro kecil.

Masalah lain adalah bagaimana menjadikan lembaga pembiayaan bank dan non-bank di tingkat daerah (Kota/Kabupaten) ini tidak hanya sebagai lembaga penyalur modal (investasi dan modal kerja), tetapi juga mampu berperan sebagai akselerator pembangunan dan bahkan sebagai struktur dalam learning processes and best practice terutama untuk menumbuhkan dua hal penting, yaitu kewirausahaan dan manajemen. Dengan kata lain, perbankan daerah seharusnya mampu berperan ganda dalam perekonomian saat ini, yaitu sebagai penggerak bisnis dan penyelamat UMK yang kritis.

Program-program dan pola pembiayaan UMK misalnya pada bidang usaha hortikultura/tanaman pangan, perikanan/kelautan dan industri rumah tangga di kabupaten/kota Sulawesi Selatan yang telah dilakukan oleh perbankan daerah serta mendapat dukungan dari peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia belum terasa benar-benar manfaatnya. Terutama secara riil belum memberi efek yang berarti bagi peningkatan pendapatan masyarakat, terutama yang bergerak pada bidang usaha (UMK) hortikultura/tanaman pangan, perikanan/kelautan, dan industri rumah tangga. Penyaluran berbagai skema kredit UMK baik dari sisi perbankan (supply side) maupun dari sisi pengusaha UMK (demand side) pada bidang usaha hortikultura/tanaman pangan, perikanan/kelautan, dan industri rumah tangga masih sangat terkendala.

METODE

Penelitian ini dilakukan di daerah Sulawesi Selatan dengan memilih sampel daerah dari beberapa kabupaten/kota yang dapat mewakili karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang ada di Sulawesi Selatan. Populasi penelitian adalah pengusaha mikro dan kecil yang mengambil kredit melalui lembaga perbankan maupun bukan perbankan (non-bank). Pertimbangan dipilihnya unit UMK sebagai populasi penelitian adalah mengingat UMK perlu mendapat perhatian khusus oleh perbankan dalam rangka memperlancar proses pembiayaan.

Pada kabupaten/kota yang terpilih sebagai wilayah penelitian dipilih sampel dengan metode accidental sampling dengan total responden sebanyak 360 unit usaha. Secara metodologi sampel sebanyak 200 dianggap sudah representatif dapat mewakili populasi (Ferdinand, 2002).

Metode ini digunakan dengan pertimbangan karakteristik populasi relatif homogen berdasarkan masing-masing jenis usaha. Kriteria utama yang diperhatikan dalam pemilihan sampel (responden) mengacu pada kriteria unit analisis. Unit analisis dalam penelitian adalah UMK yang mengambil/memperoleh bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank.

Penentuan daerah kabupaten/kota sebagai wilayah sampel penelitian didasarkan pada kondisi karakteristik jenis usaha (hortikultura/tanaman pangan, perikanan/kelautan, dan industri rumah tangga) pada masing-masing kabupaten/kota di Sulsel sebagai daerah penelitian (BPS, Sulsel dalam Angka, 2016). Berdasarkan sentra jenis usaha tersebut di atas pada masing-masing kabupaten/kota di Sulsel, maka dipilih enam kabupaten/kota, yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Wajo, Enrekang, Takalar, dan Bulukumba sebagai sampel wilayah penelitian.

Kota Makassar dipilih sebagai daerah sampel penelitian di mana kota tersebut lebih banyak mewakili jenis industri rumah tangga. Kabupaten Pangkep dan Bulukumba lebih banyak mewakili

jenis usaha perikanan/kelautan. Sedangkan Kabupaten Wajo dan Enrekang lebih mewakili jenis usaha hortikultura/tanaman pangan. Kabupaten Takalar merupakan daerah satu-satunya yang mewakili tiga jenis usaha, yakni hortikultura/tanaman pangan, perikanan/kelautan, dan industri rumah tangga.

Di samping unit usaha dikelompokkan dalam jenis usaha, juga dikelompokkan dalam skala usaha mikro dan kecil. Pengelompokan skala usaha mikro dan kecil didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/39/PBI/2005 dengan dasar omzet penjualan per tahun.

Metode analisis data

Untuk mengetahui perilaku UKM dalam pengambilan kredit melalui lembaga pembiayaan bank dan non-bank, maka digunakan model analisis Chi-Square. Analisis Chi-Square, dimaksudkan untuk mengetahui hubungan lembaga pembiayaan bank dan non-bank dalam penyaluran kredit dengan karakteristik unit usaha menurut (a) status badan usaha; (b) Jenis usaha; (c) kepemilikan tempat usaha; (d) ketersediaan dokumen kredit; (e) nilai asset; dan (f) skala usaha; dengan formula sebagai berikut:

$$(\chi^2_h) = \sum_i^b \sum_j^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

dimana:

χ^2_h = Chi-Square

O_{ij} = Frekuensi yang diobservasi pada baris i dan kolom j

E_{ij} = Frekuensi yang diharapkan pada baris i dan kolom j

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data primer tampak bahwa pada skala usaha mikro jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 1.935.075 ribu, masing-masing 85,93 persen dan 14,07 persen dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank. Sedangkan pada usaha kecil jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 4.615.797 ribu, yaitu untuk lembaga pembiayaan bank 78,54 persen dan 21,46 persen dari lembaga pembiayaan non-bank. Secara keseluruhan nilai kredit yang disalurkan oleh lembaga pembiayaan bank dan bank terhadap 360 unit usaha sebesar Rp 6.550.872 ribu, terdiri dari 80,72 persen bersumber dari lembaga pembiayaan bank dan selebihnya 19,28 persen dari lembaga pembiayaan non-bank (Tabel 1).

Tabel 1.

Peranan Lembaga Pembiayaan Bank dan Non-bank Terhadap Total Nilai Kredit Menurut Skala Usaha (ribu rupiah)

Skala Usaha	Bank		Non-bank		Jumlah	
	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal
Mikro	85.93	1,662,787	14.07	272,288	100.00	1,935,075
Kecil	78.54	3,625,344	21.46	990,453	100.00	4,615,797
Jumlah	80.72	5,288,131	19.28	1,262,741	100.00	6,550,872

Tabel diatas menjelaskan rata-rata nilai kredit berdasarkan jenis usaha, dan skala usaha pada masing-masing jenis lembaga pembiayaan bank dan non-bank. Rata-rata nilai kredit secara totalitas di antara 360 debitur sebesar Rp 17,93 juta. Jika diurai berdasarkan jenis lembaga pembiayaan, tampak bahwa nilai kredit dari bank relatif lebih tinggi daripada non-bank, yakni masing-masing sebesar Rp 22,67 juta dan Rp 8,78 juta.

Selanjutnya, tampak bahwa semakin besar skala usaha semakin tinggi nilai kredit yang dapat diambil dari lembaga pembiayaan bank maupun non-bank. Hal tersebut memberi indikasi bahwa tidak ada perbedaan perilaku pemberian kredit oleh kedua lembaga pembiayaan tersebut, tergantung pada nilai omzet unit usaha yang bersangkutan.

Tabel 2.

Rata-Rata Nilai Kredit Menurut Sumber Pembiayaan dan Skala Usaha dalam Ribuan Rupiah

Skala Usaha	Bank	Non-bank	Bank dan Non-bank	Rata-Rata (N)
Mikro (n)	18.683 (82)	8.509 (26)	34.508 (13)	14.527 (121)
Kecil (n)	28.323 (124)	8.923 (109)	34.346 (6)	24.802 (239)
Rata-Rata (N)	22.668 (206)	8.785 (135)	34.395 (19)	17.926 (360)

Di sisi lain, ada indikasi bahwa debitur yang mengambil kredit lebih dari satu sumber pembiayaan disebabkan karena nilai kredit yang diberikan oleh masing-masing lembaga pembiayaan (bank atau non-bank) dianggap belum cukup untuk membiayai usaha yang sementara dijalankan. Tampak bahwa rata-rata nilai kredit yang diambil dari kedua lembaga pembiayaan tersebut hampir tiga kali lipat dari masing-masing lembaga pembiayaan bank dan non-bank (Hasil olah data primer 2017).

Pemetaan sumber pembiayaan berdasarkan (bank dan non bank) dan karakteristik UMK

Status Badan Usaha

Di antara 360 responden (debitur) terdapat 57,22 persen unit usaha yang dibiayai (kredit) oleh lembaga pembiayaan bank dan 37,50 persen oleh non-bank, sisanya sebesar 5,28 persen kredit dibiayai oleh bank dan non-bank (Hasil olah data primer 2017). Tampak bahwa lembaga pembiayaan bank cenderung membiayai unit usaha yang memiliki badan usaha dibanding unit usaha yang tidak memiliki badan usaha. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari hubungan antara status badan usaha dengan sumber pembiayaan.

Berdasarkan uji statistik tampak bahwa nilai chi square adalah berbeda nyata pada level signifikansi 5%, dimana nilai statistik X^2_{hit} = 13,687 lebih besar dibandingkan dengan X^2_{tabel} = 5,99. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena sumber pembiayaan bank lebih mengutamakan unit usaha (UMK) yang memiliki badan usaha dibanding unit usaha yang tidak memiliki badan usaha dalam pemberian kredit.

Jenis Usaha

Ada kecenderungan bahwa lembaga pembiayaan bank lebih memilih unit usaha hortikultura/tanaman dibandingkan dengan jenis usaha lainnya dalam penyaluran kredit. Namun, jika dianalisis lebih lanjut dengan uji statistik, tampak bahwa tidak ada perbedaan proporsi yang nyata antara bidang usaha dengan permohonan kredit karena hasil uji statistik tersebut menunjukkan hubungan yang tidak signifikan, dimana nilai statistik X^2_{hit} = 3,692 (lihat lampiran hasil analisis Chi-Square) lebih kecil dibandingkan X^2_{tabel} = 9,49 pada level signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan bank tidak membedakan pemberian kredit berdasarkan jenis usaha, tetapi lebih banyak ditentukan oleh prospek usaha ke depan (Soekartawi, 1998).

Tempat Usaha

Dari seluruh responden yang mengambil kredit tampak bahwa tidak ada perbedaan pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan antara bank dengan non-bank atas unit usaha yang berstatus milik sendiri dengan sewaan (memiliki proporsi yang sama).

Jika dianalisis lebih lanjut dengan uji statistik, tampak bahwa tidak ada perbedaan proporsi yang nyata antara kepemilikan tempat usaha dengan sumber pembiayaan, dimana hasil uji statistik tersebut menunjukkan hubungan yang tidak signifikan (X^2_{hit} = 0,29 lebih kecil dibanding dengan X^2_{tabel} = 5,99 pada level signifikansi 5%). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan bank tidak membedakan pemberian kredit berdasarkan status kepemilikan tempat usaha.

Ketersediaan Dokumen Kredit

Tidak bisa disangkal lagi bahwa lembaga pembiayaan bank cenderung memberikan kredit pada unit usaha yang memiliki dokumen kredit dibanding dengan lembaga pembiayaan non-bank, yakni antara 85,92 persen dengan 50,37 persen (Hasil olah data primer 2017). Kecenderungan tersebut jika uji secara statistik tampak bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sumber pembiayaan dengan ketersediaan dokumen kredit pada level signifikansi 5% (statistik X^2_{hit} = 62,16 lebih besar dibandingkan X^2_{tabel} = 5,99).

Hal ini menunjukkan bahwa bank memang lebih mempercayai yang memiliki dokumen kredit dibanding dengan yang tidak memiliki dokumen kredit. Jenis dokumen kredit yang dominan tidak dimiliki unit usaha antara lain adalah laporan keuangan, NPWP dan TDP. Itulah sebabnya unit usaha yang tidak memiliki dokumen kredit lebih cenderung mengambil kredit pada lembaga non-bank karena lembaga ini tidak menjadikan dokumen kredit sebagai persyaratan utama.

Nilai Aset

Jika sumber pembiayaan dihubungkan dengan nilai aset usaha, maka tampak bahwa lembaga pembiayaan bank cenderung lebih membiayai unit usaha yang memiliki nilai aset yang lebih besar (Hasil olah data primer 2017), meskipun nilai aset tidak menjadi syarat penting dalam pemberian kredit perbankan. Namun kinerja unit usaha yang dimiliki aset lebih tinggi relatif lebih bagus dibanding dengan

unit usaha yang memiliki aset rendah, sehingga pihak perbankan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengambilan kredit (Yunus, 2007). Jika kecenderungan tersebut di atas dianalisis lebih jauh, maka tampak bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sumber pembiayaan dengan nilai aset unit usaha, dimana nilai statistik X^2 hitung = 16,589 lebih besar dibandingkan X^2_{tabel} = 9,49 pada level signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan bank cenderung memprioritaskan pemberian kredit pada unit usaha yang memiliki nilai aset usaha yang relatif lebih besar.

Skala Usaha

Di antara 360 responden (debitur) terdapat 39,81 persen unit usaha mikro dibiayai oleh lembaga pembiayaan bank, sementara hanya 19,26 persen yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan non-bank. Sebaliknya, terdapat 60,19 persen usaha kecil dibiayai oleh lembaga pembiayaan bank, sementara 80,74 persen usaha kecil yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan bukan.

Jika dianalisis lebih jauh yakni dengan menggunakan uji statistik chi square maka kecenderungan tersebut signifikan pada level signifikansi 5%, dimana nilai statistik X^2_{hitung} = 31,836 (lihat lampiran Hasil Analisis Chi-Square) lebih besar dari X^2_{tabel} = 5,99. Hubungan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata pada sumber pembiayaan kredit antara skala usaha mikro dan kecil. Tampak pada Tabel 16 bahwa lembaga pembiayaan bank yang lebih banyak memberikan kredit pada usaha mikro dibandingkan dengan usaha kecil. Hal tersebut diakibatkan adanya dana dari pemerintah maupun BUMN yang disalurkan kepada usaha mikro melalui lembaga pembiayaan bank. Disisi lain kecendrungan lembaga pembiayaan non-bank memberikan kredit pada usaha kecil dibandingkan dengan usaha mikro diakibatkan oleh di samping semakin berkurangnya pangsa pasar pada usaha mikro juga diakibatkan oleh semakin ketatnya dalam mendapatkan kredit pada lembaga pembiayaan bank.

Di sisi lain, tampak bahwa di antara 360 unit usaha yang dibiayai oleh lembaga keuangan terdapat 19 unit usaha yang mendapat pembiayaan dari dua sumber, yakni di samping dibiayai oleh lembaga perbankan juga oleh lembaga pembiayaan non-bank seperti koperasi, ventura, pegadaian, BUMD/M, BMT dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara mendalam (indepth interview) terhadap ke sembilan belas (5,28 persen) debitur tersebut terdapat beberapa orang di antaranya memberi alasan bahwa “plafond kredit masing-masing di bank maupun non-bank masih relatif kecil dibanding dengan jumlah kebutuhan modal usaha yang kami tekuni. Kondisi tersebut mendorong unit usaha mikro dan kecil mengambil kredit pada dua lembaga pembiayaan bank dan non-bank secara bersamaan.

Kecenderungan unit usaha yang mengambil kredit pada kedua lembaga tersebut tampak bahwa skala usaha mikro lebih besar daripada skala usaha kecil, yakni masing 68,42 persen dan 31,58 persen (Hasil olah data primer 2017). Hal tersebut semakin memperkuat alasan bahwa persoalan plafond kredit yang terbatas bagi unit usaha (mikro) mendorong unit usaha mikro mengambil kredit baik pada bank maupun pada lembaga pembiayaan non-bank.

Pemetaan sumber pembiayaan berdasarkan bank (pemerintah dan swasta) dan karakteristik UMK

Status Badan Usaha

Jika dirinci lebih jauh tentang pembiayaan kredit berdasarkan sumber pembiayaan perbankan, maka dapat dirinci pola hubungan antara karakteristik unit usaha dengan jenis pembiayaan lembaga perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada indikasi bahwa ada kecenderungan lembaga keuangan bank milik swasta lebih memilih unit usaha yang berbadan usaha dibanding dengan yang tidak berbadan usaha, yakni masing-masing 55,00 persen dengan 45,00 persen (Hasil olah data primer 2017). Namun kecenderungan tersebut jika diuji secara statistik, tampak tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai statistik (X^2_{hitung} = 1,437 lebih kecil dibandingkan X^2_{tabel} = 3,84). Dengan demikian lembaga pembiayaan bank (pemerintah dan swasta) tidak membedakan penyaluran kredit berdasarkan status badan usaha.

Jenis Usaha

Tampak bahwa lembaga keuangan bank milik pemerintah lebih memilih membiayai unit usaha hortikultura dan perikanan dibanding dengan jenis usaha industri RT. Sebaliknya lembaga pembiayaan bank milik swasta lebih cenderung memilih membiayai unit usaha industri RT dibanding dengan jenis usaha hortikultura dan perikanan. Hubungan antara jenis usaha dengan jenis bank sebagai sumber pembiayaan tampak signifikan pada tingkat signifikansi 5% (X^2_{hitung} = 32,11 lebih kecil dibandingkan X^2_{tabel} = 5,99).

Hubungan yang signifikan tersebut dilihat dari sisi permintaan kredit memberi indikasi bahwa usaha hortikultura/tanaman pangan lebih memilih bank milik pemerintah sebagai sumber pembiayaan usaha dibanding dengan lainnya. Namun jika dilihat dari sisi penawaran, hal tersebut dimungkinkan karena bank milik pemerintah banyak tersedia di daerah kabupaten (pedesaan) dan mudah diakses oleh jenis usaha hortikultura dan perikanan.

Kepemilikan Tempat Usaha

Dari 205 unit usaha yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan bank milik pemerintah terdapat 86,83 persen disalurkan kepada unit usaha milik pribadi dan sisanya 13,17 persen disalurkan pada unit usaha yang disewa. pembiayaan (kredit) 193 unit berstatus sebagai tempat usaha milik sendiri. Di sisi lain lembaga pembiayaan bank milik swasta justru terjadi kecenderungan yang sebaliknya, bank milik swasta lebih mengucurkan kredit ke unit usaha sewaan dibanding dengan unit usaha milik pribadi (Hasil olah data primer 2017). Namun setelah kecenderungan tersebut diuji secara statistik, tampak tidak signifikan pada level signifikansi 5%, dengan nilai statistik X^2 hitung 1,44 lebih kecil dibanding dengan nilai $X^2_{tabel} = 3,84$. Dengan demikian pada hekatnya lembaga pembiayaan bank, milik pemerintah dan milik swasta tidak membedakan (memprioritaskan) penyaluran kredit antara unit usaha berdasarkan status kepemilikan unit usaha.

Ketersediaan Dokumen Kredit

Tampak secara empiris (sampel) bahwa lembaga pembiayaan bank milik pemerintah tidak memiliki pola yang berbeda dengan lembaga pembiayaan bank milik swasta, yakni masing-masing lebih cenderung memilih unit usaha yang memiliki dokumen kredit secara lengkap daripada unit usaha yang memiliki dokumen kredit tidak lengkap, yakni masing-masing 85,85 persen dengan 90,00 persen (Hasil olah data primer 2017). Namun jika kecenderungan tersebut diuji dengan menggunakan statistik Chi-square ternyata hal tersebut tidak berbeda nyata, dengan kata lain apa yang terjadi diempiris (sampel) ternyata tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% (nilai statistik X^2 hitung 1,44 lebih kecil dibanding dengan nilai $X^2_{tabel} = 3,84$). Dengan demikian lembaga pembiayaan bank pemerintah tidak memiliki perbedaan perilaku pengucuran kredit dengan bank milik swasta berdasarkan ketersediaan dokumen kredit.

Nilai Aset Usaha

Nampak bahwa ada kecenderungan bank swasta lebih memilih unit usaha yang bonafit (memiliki nilai aset lebih besar) dibanding dengan unit usaha yang memiliki aset usaha yang relatif lebih kecil. Sementara sebaliknya bank pemerintah lebih memilih sikap sebaliknya, yakni lebih memihak pada masyarakat kecil (unit usaha yang memiliki nilai aset usaha yang relatif kecil). Jika hal tersebut diuji secara statistik tampak bahwa kecenderungan ini memiliki hubungan yang signifikan pada tingkat signifikansi 5% (nilai statistik X^2 hitung 7,42 lebih besar dibanding dengan nilai $X^2_{tabel} = 5,99$).

Dengan demikian ada indikasi mengapa bank pemerintah lebih cenderung mengucurkan kreditnya pada unit usaha yang memiliki nilai aset lebih kecil, ini dimungkinkan karena fasilitas kredit pemerintah (bank pemerintah) lebih banyak tersedia di daerah pedesaan (usaha mikro kecil) dibanding dengan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank swasta. Sehingga dengan demikian akses unit usaha mikro kecil ke lembaga pembiayaan bank pemerintah lebih tinggi daripada ke lembaga pembiayaan bank swasta.

Skala Usaha

Tampak bahwa skala usaha mikro lebih banyak dibiayai oleh bank pemerintah dibanding dengan bank swasta dalam pembiayaan kredit. Hal tersebut ditunjukkan oleh proporsi (persen) skala usaha mikro lebih besar (61,95 persen) dibandingkan dengan proporsi skala usaha kecil pada bank pemerintah (38,05 persen) dalam penerimaan kredit. Jika hal tersebut dianalisis lebih jauh, maka tampak bahwa terdapat perbedaan pola pembiayaan kredit antara bank milik pemerintah dengan bank milik swasta (Hasil olah data primer 2017). Dari hasil uji statistik tampak bahwa nilai statistik X^2 hitung = 7,42 lebih besar daripada nilai $X^2_{tabel} = 5,99$. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (level signifikansi 5 %) antara lembaga pembiayaan bank milik pemerintah dengan bank milik swasta dalam penyaluran kredit berdasarkan skala unit usaha.

Nampak bahwa lembaga keuangan bank milik pemerintah lebih banyak membiayai unit usaha mikro, sebaliknya bank milik swasta lebih cenderung membiayai unit usaha skala kecil. Hal tersebut dimungkinkan karena lembaga pembiayaan bank milik pemerintah di samping lebih berani menanggung

risiko kredit juga diakibatkan oleh jangkauan bank milik pemerintah telah sampai ke ibukota kecamatan dimana banyak terdapat unit usaha yang berskala mikro. Sementara lembaga pembiayaan bank milik swasta lebih banyak tersedia di daerah perkotaan (wilayah kecamatan di ibu kota kabupaten/kota).

Pemetaan sumber pembiayaan non-bank (koperasi dan lainnya) berdasarkan karakteristik UMK

Unit usaha yang menggunakan sumber pembiayaan non-bank terdiri dari 254 unit usaha yang terdiri dari 135 unit usaha yang hanya menggunakan lembaga pembiayaan non-bank dan 19 unit usaha memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank. Di antara unit usaha yang menggunakan sumber pembiayaan pada lembaga pembiayaan, maka koperasi sebagai sumber pembiayaan unit usaha memegang peran penting dalam pembiayaan pada unit usaha mikro dan kecil dimana jumlah responden menggunakan koperasi sebagai sumber pembiayaan sebesar 78,57 persen. Selanjutnya unit usaha yang menggunakan sumber pembiayaan usaha melalui pegadaian sebanyak 15 orang atau sebesar 9,74 persen. Kemudian unit usaha yang memperoleh kredit dari ventura sebesar 7,79 persen (12 unit usaha) serta sumber pembiayaan yang lain adalah BMT sebesar 3,90 persen (Hasil olah data primer 2017).

Status Badan Usaha

Di antara 154 responden (debitur) terdapat 78,57 persen UMK dibiayai oleh koperasi, selebihnya hanya 21,43 persen unit usaha dibiayai oleh lembaga pembiayaan bukan koperasi (BMT, Ventura, Pegadaian). Sementara itu dari 78,57 persen tersebut 85,95 di antaranya tidak berbadan hukum (Hasil olah data primer 2017). Hal ini disebabkan pihak debitur lebih mempercayai koperasi dibanding dengan yang lainnya sebagai sumber pembiayaan bukan bank.

Jika dianalisis lebih jauh dengan menggunakan uji statistik chi square maka kecenderungan tersebut signifikan pada level signifikansi 5%, dimana nilai statistik $X^2_{hit} = 22,421$ lebih besar dari $X^2_{tabel} = 3,84$. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan non-bank (koperasi) tidak mengutamakan unit usaha memiliki badan usaha dalam pemberian kredit. Kecenderungan tersebut disebabkan karena koperasi memberikan kredit lebih mengutamakan pada anggotanya tanpa memperhatikan status badan usaha dari unit usaha. Berbeda halnya dengan lembaga pembiayaan non-bank lainnya lebih cenderung memperhatikan status badan usaha dari unit usaha dalam pemberian kredit.

Jenis Usaha

Koperasi sebagai sumber pembiayaan non-bank bagi unit usaha tidak membedakan unit usaha dalam penyaluran kredit. Berbeda halnya dengan lembaga pembiayaan non-bank lainnya lebih cenderung membiayai jenis usaha industri rumah tangga. Berdasar pada uji statistik chi square dengan signifikansi 5% menunjukkan $X^2_{hitung} = 60,629$ lebih besar dari $X^2_{tabel} = 5,99$ dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari lembaga pembiayaan non-bank dalam pemberian kredit pada jenis usaha. Hal ini disebabkan oleh lembaga pembiayaan koperasi lebih mengemban tugas sebagai soko guru perekonomian rakyat sehingga semua jenis usaha lebih dan lebih berani mengambil risiko dibanding dengan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, dimana tercermin dari tingginya keterlibatan koperasi pada jenis usaha perikanan/kelautan yang beresiko tinggi. Berbeda halnya dengan lembaga pembiayaan non-bank lainnya lebih cenderung membiayai jenis usaha industri rumah tangga karena memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis usaha hortikultura/tanaman pangan dan perikanan/kelautan.

Kepemilikan Tempat Usaha

Dari seluruh responden, yang menerima kredit tampak bahwa lembaga pembiayaan non-bank cenderung memperhatikan status kepemilikan tempat usaha. Dan jika kita amati lebih lanjut dengan uji statistik, tampak bahwa terdapat perbedaan yang nyata dalam pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan non-bank pada unit usaha berdasarkan status kepemilikan tempat usaha ($X^2_{hitung} = 15,629$ lebih besar dibanding dengan $X^2_{tabel} = 3,84$ pada level signifikansi 5%). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan non-bank baik koperasi maupun lembaga lainnya membedakan pemberian kredit pada unit usaha berdasarkan status kepemilikan tempat usaha. Di mana lembaga pembiayaan non-bank baik koperasi maupun lembaga lainnya lebih cenderung memberikan kredit pada unit usaha yang status kepemilikan tempat usahanya adalah milik pribadi dengan alasan lebih aman dari sisi pemberi kredit.

Ketersediaan Dokumen Kredit

Unit usaha yang tidak memiliki dokumen kredit lebih cenderung dibiayai oleh lembaga non-bank koperasi dibandingkan dengan lembaga lainnya. Kecenderungan tersebut jika uji secara statistik tampak bahwa ada perbedaan yang signifikan antara ketersediaan dokumen kredit dengan sumber pembiayaan pada level signifikansi 5% (statistik X^2_{hit} = 15,574 lebih besar dibandingkan X^2_{tabel} = 3,84).

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga non-bank khususnya koperasi lebih mengakomodir unit usaha yang tidak memiliki dokumen kredit dibandingkan dengan lembaga lainnya, meskipun secara empiris ada unit usaha yang memiliki dokumen kredit tetapi tetap mengajukan kredit pada lembaga non-bank karena proses kredit pada lembaga pembiayaan non-bank lebih cepat.

Nilai Aset

Jika nilai aset unit usaha dihubungkan dengan lembaga pembiayaan non-bank terlihat bahwa 80,52 persen pemilik aset lebih kecil dari 50 juta rupiah cenderung memperoleh kredit melalui lembaga pembiayaan non-bank (Hasil olah data primer 2017).

Jika kecenderungan tersebut di atas dianalisis lebih jauh, maka tampak bahwa ada hubungan yang signifikan antara nilai aset usaha dengan lembaga pembiayaan non-bank, dimana nilai statistik X^2_{hitung} = 25,024 lebih besar dibandingkan X^2_{tabel} = 5,99 pada level signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan non-bank cenderung membedakan pemberian kredit berdasarkan nilai aset usaha. Unit usaha yang memiliki nilai aset di bawah Rp 50 juta lebih dominan dibiayai oleh koperasi, sedangkan aset usaha di atas Rp 50 juta lebih didominasi oleh lembaga pembiayaan non-bank lainnya. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa lembaga pembiayaan koperasi lebih berani mengambil risiko kredit dibanding dengan lembaga pembiayaan non-bank lainnya. Di sisi lain juga dapat menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan non-bank lainnya memiliki kapasitas dan peluang lebih tinggi dibanding dengan lembaga pembiayaan koperasi dalam penyaluran kredit pada unit usaha yang memiliki nilai aset lebih besar.

Skala Usaha

Di antara 154 responden (debitur), 121 unit usaha yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan non-bank (koperasi) atau sebesar 84,30 persen adalah unit usaha mikro. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa lembaga pembiayaan non-bank (koperasi) cenderung memperhatikan unit usaha dengan skala usaha mikro dibandingkan dengan lembaga pembiayaan non-bank lainnya (Hasil olah data primer 2017).

Jika dianalisis lebih jauh yakni dengan menggunakan uji statistik chi square maka kecenderungan tersebut signifikan pada level signifikansi 5%, dimana nilai statistik X^2_{hit} = 27,359 lebih besar dari X^2_{tabel} = 3,84. Hubungan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata pada lembaga pembiayaan non-bank terhadap unit usaha mikro dan kecil. Unit usaha mikro tampak lebih dominan dibiayai oleh koperasi dan sebaliknya unit usaha kecil lebih didominasi oleh lembaga pembiayaan non-bank lainnya.

SIMPULAN

Peranan lembaga pembiayaan bank masih sangat dominan dibanding dengan lembaga pembiayaan non-bank dalam hal penyaluran kredit pada UMK di Sulawesi Selatan, baik pada skala usaha mikro maupun pada skala usaha kecil.

Tidak ada perbedaan yang signifikan pemberian kredit menurut jenis usaha (hortikultura/tanaman pangan, perikanan/kelautan dan industri rumah tangga) baik lembaga pembiayaan bank maupun non-bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga jenis usaha tersebut di sisi lembaga pembiayaan memiliki prospek usaha yang relatif sama.

UMK yang mengambil kredit melalui 2 sumber lembaga pembiayaan (bank dan non bank) memiliki rata-rata nilai kredit lebih besar dibandingkan dengan yang memilih hanya salah satunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa plafond kredit masing-masing yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan relatif kecil dibanding dengan jumlah kebutuhan kredit oleh unit usaha yang ada.

Di antara unit usaha yang bankable terdapat 25,59 persen yang lebih memilih lembaga pembiayaan non-bank. Hal tersebut disebabkan karena prosedur dan jangka waktu pencairan kredit masih relatif lama dan berbelit-belit.

Lembaga pembiayaan non-bank (koperasi) telah mengaplikasikan konsep penilaian kredit (5 C), khususnya pada penilaian karakter nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Ade, dan Ahmad A. Bachri, (2000), "Pengaruh Pembinaan Manajemen UMKM oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) terhadap Kinerja UMKM di Kalimantan Selatan," Laporan Penelitian, Kerjasama LM-FEUNLAM- PT PKT Bontang: Banjarmasin
- Bachri, Ahmad A., Dkk (2001a), "Penelitian Evaluasi dan Monitoring Perkembangan UMKM Mitra Binaan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin Kalimantan Selatan," Lapaoran Penelitian, Kerjasama LBIM - PT Angkasa Pura I: Banjarmasin
- Bank Indonesia Makassar, (2005), "Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Sulawesi Selatan," Bank Indonesia Makassar, Makassar.
- BAPPENAS, (1999), "Menatap Kedepan Perekonomian Indonesia," BAPENAS: Jakarta.
- Biro Kredit Bank Indonesia, (2002), "Penelitian Pola Pembiayaan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pasca UU BI No. 23 tahun 1999," Laporan Penelitian, Bank Indonesia: Jakarta
- BPS, (2000), "Statistik Industry Kecil: Small – Scale Manufacturing Industry Statistics," Biro Pusat Statistik: Jakarta
- BPS-Bappeda Sul-Sel, "Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun, Berbagai Terbitan 1993-2004, Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan: Makassar.
- Budisantoso, (2006), Bank dan Lembaga Keuangan, Salemba Empat, Jakarta.
- Coleshaw, John, (1989), "Credit Analysis: How to Measure and Manage Credit Risk," Wood head Faulkner Limited: England.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, (2001), "Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis," Bank Indonesia: Jakarta.
- Eales Rob, (1997), "Credit Risk Measurement in Corporate Banking: Theory and Practice," Reserve Bank of Australia Bank, Supervision Department
- Hidayat, Agus, (2006), "Skim Pembiayaan bagi Pengembangan Pertanian dan Perikanan," Paper Dipresentasikan pada Seminar Regional dan Diskusi Terfokus, ISEI. Makassar.
- Jhingan, ML, (1999), "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan," Rajawali Press: Jakarta.
- Maupa, Haris, (2004), "Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Usaha Kecil di Sulawesi Selatan," Disertasi Doktor Ekonomi, PPS-UNHAS (tidak diterbitkan): Makassar.
- Navajas, Ruiz Alvaro, (2001), "Credit Guarantee Schemes: Conceptual Frame," Financial System Depeloment Project, GTZ/FONDESIF.
- Robinson, M.S., (2004), "The Microfinance Revolution," Vol. 1-3 (Sustainable Finance for the Poor; Lesson from Indonesia; The Emerging Industry, Washington, D.C.: The World Bank.
- Said, Adri, (2007), "Akses Keuangan UMKM" Yayasan Kontrad Adenauer, Jakarta
- Tambunan, Tulus T.H, (2002), "Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Salemba Empat: Jakarta
- Todaro, M. P., (1995), "Economic Development in the Third World," 3rd ed. Longmen Inc.: New York.
- Undang-undang No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Untoro, (2004), "Default Risk dan Penjaminan Kredit UKM," Bank Indonesia Working Paper WP/01/PPSK/05, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia: Jakarta.
- Zain, Muhammad Yunus, (2006), "Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan Di Sulawesi Selatan", Kerjasama RIELbank dan Bank Indonesia.